

DAFTAR PUSTAKA.

Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.

AA. GN Ari Dwipayana et al. *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.

_____, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Uud 1945*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1997

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2015

Deddy Supriady Bratakusumah Dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Hanif Nurcholis, *Perrtumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Cetakan Keenam Jakarta: Erlangga, 2014.

Haw. Widjaja, *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1993.

Indra bastian, *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Yogyakarta. 2006

Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.

Ni'Matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015.

_____, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan problematika*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

_____, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2007.

Sutoro Eko Dan Abdur Rozak (Eds), *Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2005.

Purwanto Santoso, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peratura Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Jurnal Hukum, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

M. Iwan Satriawan, *Politik Hukum Pemerintahan Desa*, Jakarta: Jurnal Konstitusi, Kerja Sama PSHK UII dengan MKRI, Volume 1 No. 1 November 2012.

Jurnal Konstitusi, PSHK-FH Universitas Islam Indonesia, Volume III Nomor 2, Nopember 2010.

Dwi Kartika Sari, “ *Kala Otonomi (Belum) Berhasil*”, HIMMAH, No. 01/Thn. XLV/2012,

Wawancara

Yuan Purwanto, Carik Desa Wirokerten.

Eko Purwanto, SIP. Kepala desa Desa Jagalan

Data Internet

<file:///G:/Bahan/Kedudukan%20Pemerintahan%20Desa%20dalam%20Konstitusi%20dan%20Peraturan%20Perundang-undangan%20-%20hukumonline.com.htm> di akses pada hari jum'at tgl 23 November 2015.

www. Htt/ Buku Laporan Kajian sistem pengelolaan keuangan desa. Di akses pada Hari sabtu Tgl 31 Oktober 2015.

<http://www.antaraneews.com/berita/410137/uu-desa-disahkan-kades-harus-belajar-pembukuan> dikutip tanggal 18 November 2015.

<http://jurnalakuntansikeuangan.com/2013/12/dpr-ri-kepala-desa-harus-belajar-accounting> dikutip pada tanggal 15 November 2015.

